

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia pernah menjadi sorotan media dan aktor internasional pada saat Indonesia dianggap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam insiden Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur (sekarang Timor-Leste). Insiden Santa Cruz merupakan insiden yang dilatarbelakangi oleh penembakan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap ratusan pengunjuk rasa masyarakat Timor-Timur yang terjadi pada tanggal 12 November 1991 (Anwar R. , 2004). Adanya peristiwa ini menyebabkan Indonesia menjadi sorotan media asing dan menyebabkan AS mengambil langkah diplomasi koersif yang digunakan untuk menangani Insiden Santa Cruz di Timor Timur. AS melakukan ancaman untuk melakukan embargo militer kepada Indonesia yang telah melanggar nilai-nilai HAM dalam skala berat. HAM dalam skala berat yang dimaksud adalah tentara Indonesia menembaki ratusan pengunjukrasa pro-kemerdekaan Timor Timur. Insiden itu mengakibatkan ratusan orang meninggal dan luka-luka (Nardiman, 2022).

Akibat kejadian tersebut, hubungan kerjasama Indonesia dengan AS merenggang terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pasca insiden Santa Cruz pada tahun 1995, AS mengembargo Indonesia. Embargo yang diberikan merupakan embargo militer. Embargo yang dilakukan oleh AS kepada Indonesia merupakan sebuah sanksi yang digunakan oleh AS dalam persenjataan

militer Indonesia. Embargo yang dilakukan oleh AS berupa larangan terkait dengan bantuan pasokan persenjataan militer dan ekspor-impor alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) (Lubis I. R., 2022).

Merenggangnya hubungan Kerjasama antara Indonesia dengan AS memiliki dampak yang cukup signifikan yaitu Indonesia tidak dapat memenuhi pasokan persenjataan dan juga suku cadang militernya. Hal ini menyebabkan pasukan militer Indonesia mengalami penurunan dalam persiapan menghadapi pertempuran dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Dalam proses embargonya, AS tidak hanya menghentikan pasokan persenjataan militernya kepada Indonesia, namun juga memberlakukan IMET Ban (*International Military Education and Training Banned*) yaitu pemberhentian program latihan gabungan antara Indonesia-AS 1992 hingga 2005 (Arifianto & Zulkarnain, 2016).

Indonesia merupakan negara yang banyak membeli persenjataan serta kerjasama pelatihan dengan AS, menjadikan Indonesia mampu untuk memikirkan sebuah langkah-langkah yang digunakan dalam menangani proses embargo yang dilaksanakan oleh AS (Hikmawati, 2023). Dengan keberadaan langkah-langkah yang digunakan oleh Indonesia dalam menangani pemberhentian pasokan AS kepada Indonesia ini, menjadikan Indonesia melaksanakan jalinan kerjasama dengan negara-negara lain (tidak berpusat kepada bantuan AS lagi). Hal tersebut disebabkan apabila Indonesia tidak melakukan langkah penanganan, Indonesia memiliki resiko kurangnya pasokan alutsista untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terdapat data kerjasama Indonesia dengan negara lain pada saat di

embargo oleh AS yang terlampir pada lampiran 1.

Pada saat embargo berlangsung, banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia yang membutuhkan dukungan pasukan militer dan persenjataan, contohnya seperti peristiwa Bom Malam Natal (2000), Bom Bali dan Terorisme (2002), dan Gerakan separatis aceh merdeka (1976-2005). Kepercayaan AS terhadap Indonesia mulai kembali saat Indonesia berhasil menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada saat embargo sedang berlangsung. Selain itu, Indonesia juga melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati AS dalam pencabutan embargo seperti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Timor Timur selama 2 hari yang menunjukkan bahwa Indonesia menghormati kemerdekaan Timor Leste. Lalu pada Mei 2005, Presiden SBY melakukan kunjungan ke AS untuk melakukan diplomasi terkait pencabutan embargo serta kesungguhan Indonesia untuk melaksanakan pembenahan dalam penegakkan hukum dan memberi jaminan terkait keadilan (Inayati, 2016).

Kunjungan tersebut merupakan langkah diplomasi yang dilaksanakan oleh Indonesia untuk melaksanakan hubungan bilateral dengan AS sehingga dapat terjalin kembali (Inayati, 2016). Embargo AS terhadap Indonesia resmi dicabut pada November 2005. Sejak saat itu hubungan antara Indonesia dengan AS mulai pulih dan Indonesia berusaha untuk membalikkan citra negara seperti semula. Indonesia mulai melakukan impor senjata dalam jumlah besar kepada AS pasca pencabutan embargo.

Oleh karena itu, dengan menggunakan paradigma neoliberalisme dan *rational choice theory* peneliti berusaha menganalisis alasan rasionalitas di balik kembalinya kerjasama Indonesia-AS pada bidang pertahanan dan keamanan pasca embargo militer 1995-2005.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjabaran di atas didapatkan rumusan masalah, yaitu mengapa Indonesia kembali menjadikan AS sebagai mitra kerjasama pertahanan dan keamanan pasca embargo militer 1995-2005 padahal pada saat di embargo, Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian yang dilaksanakan adalah menjelaskan alasan di balik keputusan Indonesia terkait AS menjadi mitra kerjasama pertahanan keamanan Indonesia pasca embargo militer.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait alasan rasionalitas di balik kembalinya kerjasama Indonesia dengan AS pada bidang pertahanan dan keamanan pasca embargo militer.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang telah disusun oleh peneliti, maka didapatkan beberapa manfaat, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rangsangan kepada dunia pendidikan dan masyarakat luas terkait dengan rasionalitas di balik kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS pasca embargo militer.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi-praktisi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kementerian pertahanan, perusahaan pembuat alutsista, serta aktor Indonesia terkait dengan rasionalitas di balik kerjasama pertahanan dan keamanan indonesia-as pasca embargo militer.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kebijakan embargo AS terhadap Indonesia juga pernah dilakukan oleh Ira Rizka Aisyah Lubis (2022) dengan judul “Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Indonesia Melalui Embargo 1991-2005” memiliki tujuan dalam melaksanakan analisis terkait keefektifan diplomasi koersi AS kepada Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa diplomasi koersif Amerika terhadap Indonesia melalui Embargo Senjata dan IMET Ban tidak efektif. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teori yang digunakan adalah teori diplomasi koersif yang dikemukakan oleh Tom Saurer. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan koersif (melalui embargo) yang dilakukan oleh AS terdapat beberapa berjalan efektif dan

juga tidak. Hal tersebut disebabkan oleh AS yang menginginkan Indonesia untuk melaksanakan HAM sebaik-baiknya.

Penelitian yang sama mengenai embargo AS terhadap Indonesia juga ditemukan oleh Beni Sukadis (2018) yang berjudul “Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2014. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diplomasi pertahanan yang dikemukakan oleh Mihal Marcel. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama pertahanan bilateral antara AS-Indonesia yang dilaksanakan pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono digunakan untuk peningkatan profesionalisme TNI dan menjaga kedaulatan serta integritas negara Indonesia. Untuk menguatkan pertahanan, maka AS-Indonesia melancarkan program Minimum Essential Forces (MEF) yang bertujuan untuk membangun militer modern di era SBY. Kerjasama antara AS-Indonesia di era SBY tidak hanya bergerak di bidang militer, namun juga bergerak di bidang pendidikan. Sayangnya, kerjasama antara AS-Indonesia masih minim dalam pertahanan industri.

Penelitian yang berbeda ditemukan oleh Rindu Faradisah Novana (2012) dengan judul “Kerjasama Indonesia Dengan Rusia dalam Bidang Pertahanan Militer pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sejarah kerjasama

indonesia-rusia, bagaimana kerjasama indonesia-rusia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bagaimana perjanjian internasional di bidang militer dalam kurun waktu 2004-2009. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan model eksplanatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin yaitu teori *Policy Influencer System*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kerjasama Indonesia-Rusia adalah dikarenakan adanya embargo yang dilakukan oleh AS terhadap militer Indonesia. Dampak dari adanya embargo AS terhadap militer Indonesia adalah sudah tidak layak nya sistem persenjataan TNI. Pelaksanaan kerjasama Indonesia-Rusia dilaksanakan pada tahun 2005 di era kepemimpinan SBY. Kerjasama Indonesia-Rusia disahkan melalui adanya pembentukan Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTMM) yang ditandatangani pada 22 September 2005. Tawaran yang diberikan oleh Rusia dalam kerjasama militer adalah pemberian kredit sebesar \$1 miliar untuk pengadaan persenjataan Indonesia pada tahun 2006-2011 yang dilaksanakan secara bertahap.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha Iswardhana (2021) berjudul “Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard”. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, maupun keselamatan di laut dalam upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan negara. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah konsep keamanan maritim dan kepentingan nasional. Hasil penelitian ini adalah kerjasama yang

dilaksanakan oleh Indonesia-AS dilaksanakan melalui lembaga Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA RI) dan US Coast Guard dimana kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui adanya keamanan dan penanggulangan bencana yang terjadi di laut. Kerjasama antara Indonesia-AS memiliki beberapa kepentingan nasional, khususnya bagi Indonesia, kerjasama antara AS-Indonesia ini digunakan untuk melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, penanganan illegal fishing dan kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Annidya Indisari (2021) berjudul “Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Pada Era Presiden Joko Widodo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat-Indonesia pada era Presiden Joko Widodo, apa faktor pendorong dalam implementasi kerjasama Indonesia-Amerika Serikat pada era Presiden Joko Widodo, dan apa faktor penghambat kerjasama Amerika Serikat-Indonesia pada era Presiden Joko Widodo. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis eksplanasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama pertahanan dan teori kerjasama internasional. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama antara AS-Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo menunjukkan beberapa kerjasama, yaitu kerjasama pertahanan dalam tatanan pertahanan keamanan, diadakannya latihan gabungan antara militer AS-Indonesia, pengadaan *workshop* hukum militer, Indonesia-US *Security Dialogue* (IUSSD) XIII yang dilaksanakan pada 1-2 September 2015, kerjasama industri pertahanan, kerjasama transfer senjata konvensional, dan

pemberian bantuan terhadap pendidikan dan pelatihan. Dalam kerjasama Indonesia-AS terdapat faktor pendorong, yaitu sejarah hubungan antara Indonesia-AS, adanya misi untuk memerangi terorisme, dan dukungan AS terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, terdapat faktor penghambat yang disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia serta persiapan sistem yang dimiliki oleh Indonesia.

Selanjutnya, penelitian mengenai analisis pasca embargo yang dilakukan oleh AS terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Andiana Hikmawati (2023) dengan judul “Dependensi Positif Antara Indonesia- Amerika Serikat Dalam Penguatan Ketahanan Militer Pasca Embargo Militer Tahun 2005”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dependensi positif antara Indonesia- Amerika Serikat dalam penguatan ketahanan militer pasca embargo militer tahun 2005. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dependensi atau ketergantungan modern yang dikemukakan oleh Henrique Cardoso pada tahun 1979. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa adanya pemberdayaan militer Indonesia menunjukkan adanya ketergantungan positif baik Indonesia dan Amerika Serikat. Kerjasama dalam pertahanan militer Indonesia-AS merupakan hubungan yang dinamis sehingga dapat meningkatkan produktivitas kedua negara. Ketergantungan positif dibuktikan dengan adanya peningkatan impor alutsista dan transfer teknologi militer sehingga secara tidak langsung ketergantungan positif akan memberikan peningkatan pada perekonomian dan industri pertahanan.

Penelitian-penelitian di atas membahas mengenai embargo sebagai diplomasi koersif AS terhadap Indonesia, lalu upaya-upaya apa saja yang dilakukan Indonesia agar embargo militer tersebut dicabut dengan tindakan Indonesia yang dapat menyelesaikan beberapa konflik dan mencoba melobi AS dengan cara melakukan perundingan dengan pemerintah AS, serta pada pemerintahan SBY, Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia di bidang pertahanan dan keamanan. Namun sedikit yang meneliti tentang mengapa Indonesia menjadikan AS sebagai mitra kerjasama pertahanan dan keamanan setelah pencabutan embargo padahal pada saat di embargo Indonesia telah menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan dengan banyak negara. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengisi kekosongan yang tidak dibahas pada beberapa peneliti di atas dengan menganalisis rasionalitas di balik kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS pasca embargo militer.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Neoliberalisme

Neoliberalisme merupakan salah satu paradigma dalam hubungan internasional yang memfokuskan atau menitik beratkan pada rasionalitas perikatan. Neoliberalisme merupakan turunan dari salah satu teori hubungan internasional yaitu liberalisme. Neoliberalisme merupakan penantang/perbaikan dari teori neorealisme.

Neoliberalisme tidak menutup mata bahwa struktur internasional bersifat anarki. Tetapi berbeda dengan neorealisme, neoliberalisme lebih menekankan pada cara bagaimana suatu aktor dapat mencapai perdamaian

dalam struktur internasional yang anarki. Jalur perdamaian yang dimaksud adalah dengan adanya kerjasama. Jadi, dapat dikatakan bahwa bagaimana suatu aktor dapat melakukan kerjasama untuk mencapai suatu perdamaian dalam struktur internasional yang anarki (*cooperation between countries in an anarchic international structure*).

David Little dalam tulisannya yang berjudul ‘*The Recovery of Liberalism*’ mengemukakan bahwa perlunya melahirkan kembali gagasan-gagasan yang ada pada liberalisme (Little, 1993). Selain itu, para pemimpin dunia juga secara terbuka menyatakan untuk menangani isu-isu yang terjadi dalam dunia internasional melalui kerjasama, hal tersebut sejalan dengan perspektif liberalisme. Oleh karena itu, tahun 1990-an munculah neoliberalisme ini sebagai pandangan baru yang lebih memusatkan perhatian pada bagaimana cara *non-state actor* dapat mempromosikan dan membantu negara dalam melaksanakan kerjasama internasional.

Dalam tulisan Robert Keohane “*After Hegemony*”, menyatakan bahwa pentingnya *non-state actor* sebagai media negara dalam kerjasama internasional yang ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional masing masing negara, stabilitas internasional dan perdamaian dalam struktur internasional yang anarki. Keohane juga menyebutkan bahwa kerjasama merupakan sebuah syarat untuk mencapai kesejahteraan negara yang optimal (Keohane, 1984).

Steven Lamy menyatakan ada 4 asumsi dasar dari neoliberalisme (Lamy, 2001), yaitu pertama, negara adalah aktor utama dalam dunia internasional, tetapi negara bukanlah satu-satunya aktor yang penting dalam dunia internasional. Terdapat *non-state actor* sebagai mediator. Negara adalah aktor rasional yang memiliki pemikiran memaksimalkan kepentingan di setiap isu yang terjadi. Kedua, dalam dunia internasional yang kompetitif, negara berusaha untuk rasional pada pilihannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui kerjasama. Ketiga, hambatan yang paling utama dalam kerjasama adalah adanya ketidakpatuhan dan kecurangan pada saat melakukan kerjasama. Keempat, permasalahan bisa saja terjadi pada saat kerjasama, dan untuk itu negara mengerahkan sumbernya pada *non-state actor* untuk mengamankan kepentingan nasionalnya.

1.6.2 Rational Choice Theory

Dalam buku yang berjudul “*War and Change in World Politics*” oleh Robert Gilpin pada tahun 1981, *rational choice theory* dinilai membantu memahami keberadaan, baik itu keberadaan seorang individu ataupun sebuah negara yang memiliki kepentingan. Pengambilan keputusan untuk kepentingan tersebut dilakukan melalui beberapa pilihan dan diambil yang paling efektif serta keputusan/pilihan tersebut berusaha memperhitungkan pemaksimalan keuntungan dan meminimalisir kerugian.

Selanjutnya, Allison dan Zelikow (1999) dalam bukunya yang berjudul “*essence of decision*” menyatakan bahwa ada tiga model analisis kebijakan luar negeri yaitu *Rational Actor Model* (RAM), *Organization Behavior Model*, dan *Governmental Politics Model*. Namun dalam penelitian ini akan berfokus pada *Rational Actor Model* (RAM) atau Model Aktor rasional. Allison menyatakan bahwa RAM merupakan salah satu sebuah pendekatan pembuatan kebijakan negara. Dalam pendekatan tersebut sebuah negara memperhitungkan tujuan dari kepentingan awal negara. Dalam model analisis ini, terdapat empat konsep inti, yaitu tujuan dan sudut pandang, alternatif, konsekuensi, dan keputusan/pilihan.

Tujuan dan sudut pandang mengacu pada semua konsekuensi yang mungkin terjadi berdasarkan nilai dan tujuan dari beberapa pilihan. Alternatif menjelaskan bahwa negara harus memilih diantara beberapa alternatif yang ada pada situasi tertentu. Selanjutnya konsekuensi, aktor (negara) harus dapat mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang ada. Terakhir, keputusan/pilihan, Allison menyatakan bahwa pilihan rasional hanya terdiri dari pemilihan alternatif yang konsekuensinya menduduki peringkat paling tinggi dalam fungsi imbalan atau pilihan yang memaksimalkan keuntungan aktor (negara) (Allison & Zelikow, 1999).

Selain itu, dalam buku yang berjudul “*Rational Choice Theory*” yang ditulis oleh Duncan Snidal (2012), *rational choice theory* merupakan sebuah teori pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa individu atau negara membuat suatu keputusan. Keputusan tersebut

didasarkan pada 3 asumsi dasar yaitu pertama fakta dan informasi, kedua analisis, dan yang terakhir prosedur yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan. *Rational choice theory* ini berfokus pada penentu kebijakan sebuah negara. Suatu negara dihadapkan dalam berbagai pilihan yang rasional kemudian dianalisis terhadap beberapa konsekuensi yang kemudian nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yang dinilai paling efektif untuk dilakukan oleh suatu negara.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penjelasan di atas, maka peneliti menuangkannya dalam sebuah bagan alur kerangka berpikir pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Bagan Alur Kerangka Berfikir





Keputusan diambil berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional Indonesia yaitu menciptakan perdamaian dunia dan memajukan kesejahteraan umum serta adanya keputusan rasional oleh aktor Indonesia yang dilandasi oleh beberapa keuntungan

**Sumber: Ariatmaja, Wisanjaya, & Utari (2020); Keohane (1984);
Gilpin (1981)**

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Kerjasama Internasional

Dalam tulisan Robert Keohane “*After Hegemony*”, menyatakan bahwa pentingnya *non-state actor* sebagai media negara dalam kerjasama internasional yang ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional masing masing negara, stabilitas internasional dan perdamaian dalam struktur internasional yang anarki. Keohane juga menyebutkan bahwa kerjasama merupakan sebuah syarat untuk mencapai kesejahteraan negara yang optimal (Keohane, 1984).

1.7.1.2 Pilihan Rasional

Dalam dunia internasional yang kompetitif, negara berusaha untuk rasional pada pilihannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui kerjasama (Lamy, 2001). Menurut Robert Gilpin (1981) dalam bukunya yang berjudul “*War and Change in World Politics*”, rasional adalah keadaan dimana seseorang individu atau sebuah negara yang memiliki kepentingan mengambil suatu keputusan dengan berusaha

memperhitungkan pemaksimalan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan dengan pilihan yang paling efektif dan konsekuensi yang paling tinggi dalam fungsi imbalan.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Kerjasama Bilateral Indonesia-AS Bidang Pertahanan

Peneliti akan menggunakan konsep kerjasama turunan dari teori neoliberalisme yang terfokus pada kerjasama bilateral sebagai alat analisis untuk menjelaskan beberapa poin sebagai berikut.

Pertama, kerjasama apa yang dimaksud dalam penelitian ini sebelum menjelaskan mengapa kerjasama Indonesia-AS terjadi kembali. Dikarenakan banyaknya kerjasama Indonesia-AS, maka konsep ini akan memperjelas bidang kerjasama bilateral kedua.

Kedua, konsep ini juga akan menganalisis awal mula kembalinya kerjasama Indonesia-AS pasca embargo.

Ketiga, berdasarkan pemikiran Robert O. Keohane mengenai konsep kerjasama, maka konsep ini akan menganalisis apakah kembalinya kerjasama tersebut sesuai dengan tujuan negara dan dapat mengurangi kerugian atau dampak negatif.

Dengan demikian, dapat dihasilkan kesimpulan yang lebih jelas mengapa kerjasama tersebut dapat terjadi kembali dan langkah apa yang dapat diambil oleh Indonesia selanjutnya.

1.7.2.2 Rasionalitas Oleh Aktor Indonesia

Peneliti akan menggunakan teori pilihan rasional untuk menjabarkan keputusan rasional aktor Indonesia dalam memutuskan untuk menjalin kerjasama kembali dengan AS pasca dicabutnya embargo militer tahun 2005. Berangkat dari pemikiran Allison dan Zelikow dalam bukunya yang berjudul “*Essence Of Decision*” mengenai *Rational Actor Model*, peneliti akan berfokus kepada bagaimana sebuah negara (dalam penelitian ini adalah Indonesia) mengambil sebuah keputusan dengan memperhitungkan 4 konsep inti yaitu tujuan dan sudut pandang, alternatif, konsekuensi, dan keputusan yang tidak bertolak belakang dengan kepentingan awal negara, sehingga konsep ini akan menganalisis berdasarkan 4 konsep tersebut.

Pertama, bagaimana negara Indonesia menentukan tujuan yang tidak bertolak belakang dengan kepentingan awal negara Indonesia.

Kedua, alternatif apa yang Indonesia dapatkan setelah menentukan tujuan tersebut.

Ketiga, konsekuensi apa yang Indonesia dapatkan apabila menjalankan alternatif yang sudah diputuskan (apabila tidak merealisasikan kerjasama dan merelasisasikan kerjasama dengan AS).

Keempat, setelah melakukan evaluasi berdasarkan tujuan, alternatif, dan konsekuensi, keputusan apa yang didapat oleh aktor Indonesia dengan mempertimbangkan keuntungan yang paling maksimal dan tidak bertolak belakang dengan kepentingan Indonesia.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan teori dan konsep yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, penulis akan menjawab rumusan masalah dengan argumen penelitian sebagai berikut:

“Berdasarkan paradigma neoliberalisme, kerjasama Indonesia-AS pasca embargo militer dilandasi oleh prinsip negara Indonesia yaitu menciptakan perdamaian dunia dengan tetap melihat dan berfokus pada kepentingan negara. Dengan melibatkan juga aktor non-negara (perusahaan senjata), kembalinya kerjasama diharapkan dapat mencapai perdamaian dunia sesuai dengan paradigma neoliberalisme. Keputusan tersebut dianggap keputusan terbaik dan paling rasional oleh aktor Indonesia dikarenakan terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS seperti peningkatan kapabilitas militer, peningkatan keamanan regional, dan pengaruh dalam kancah internasional yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional negara. Selain itu, kerjasama militer antara Indonesia dan AS dikarenakan AS memiliki militer terkuat nomor satu di dunia. Indonesia membutuhkan kerjasama pertahanan keamanan dengan AS untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia sehingga dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.”

1.9 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian akan dijelaskan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menuliskan penelitiannya.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif eksplanatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi (Silalahi, 2006). Merujuk kedalam pengertian tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif eksplanatif untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara embargo militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia dengan kembalinya kerjasama Indonesia-AS pasca embargo.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis data (Nasution, 1996). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dilakukan pada *website* perusahaan alutsista, Kementerian Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, serta *website* pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang menjadi fokus penelitian dan sumber data terkait variabel penelitian untuk memperjelas fokus penelitian dan mempermudah pengumpulan data (Arikunto, 2010). Subjek dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia, embargo oleh AS terhadap Indonesia, dan kembalinya kerjasama kedua negara.

1.9.4 Jenis Data

Data kualitatif adalah informasi yang berbentuk non-numerik, seperti teks, narasi, gambar, bagan (Sugiyono, 2006). Dalam penelitian ini penulis akan berusaha memperoleh informasi mengenai alur embargo militer yang dilakukan oleh AS terhadap Indonesia, berita perkembangan penyelesaian kasus, kembalinya kerjasama antar kedua negara.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian (Riadi, 2016). Penelitian ini akan menggunakan sumber sekunder yang menggunakan sumber kredibel berita, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan situs pemerintah.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Riduwan, 2010). Dalam mengumpulkan data sekunder, peneliti menggunakan teknik *literature review* seperti berita, artikel, jurnal ilmiah, buku terkait penelitian, situs pemerintahan, dan informasi lainnya yang terlevan dengan topik penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses meninjau data sampai pada kesimpulan dengan menggunakan sebuah metode analisis. Metode analisis data oleh peneliti adalah teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif adalah penerapan cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum dan menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik (Creswell, 2013). Sehingga, peneliti menggunakan teori dan konsep terlebih dahulu kemudian dikuatkan oleh data dan fakta untuk menganalisis.

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data adalah tingkat akurasi, kelengkapan, dan relevansi data untuk penelitian (Mosley, 2008). Kualitas data yang berkualitas tinggi merupakan landasan penting untuk menghasilkan penelitian yang valid. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya dan relevan untuk memastikan kualitas data. Data yang berkualitas akan mendukung proses penelitian dan menghasilkan temuan yang akurat. Penggunaan referensi data, dokumentasi, dan sumber-sumber kredibel lainnya menjadi bukti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berkualitas tinggi.

Peneliti menggunakan data yang berasal dari *website* resmi pemerintah dan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini, berita internasional maupun nasional, jurnal, buku, dokumen pemerintah maupun dokumen resmi lainnya untuk menganalisis rasionalitas di balik kembalinya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS pasca embargo militer

1995-2005. Penelitian ini memperhatikan latar belakang historis kerjasama Indonesia dan AS, tujuan dan kepentingan negara Indonesia dari segi politik, ekonomi, dan pertahanan, impor senjata, serta kerjasama bilateral negara. Media merupakan salah satu jembatan untuk menganalisis rasionalitas di balik kembalinya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS pasca embargo militer 1995-2005 dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.10.1 Bab 1

Bab pertama dalam penelitian ini menjabarkan terkait gambaran umum topik penelitian dan data penunjang lainnya. Mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, dan metode penelitian. Penyusunan bab ini menjelaskan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia dalam peristiwa Santa Cruz dan kembalinya hubungan kerjasama Indonesia-AS pasca pencabutan embargo.

1.10.2 Bab 2

Pada bab dua, peneliti akan menyajikan gambaran umum yang relevan dengan topik. Sehingga dapat memperkuat arah penelitian yang akan dianalisis dalam bab selanjutnya. Peneliti akan mengkaji mengenai

hubungan Indonesia-AS sebelum Insiden Santa Cruz, penjelasan rinci mengenai Insiden Santa Cruz yang berisikan kronologi kejadian, hubungan Indonesia-AS setelah Insiden Santa Cruz berupa kebijakan AS terhadap Indonesia, dampak bagi Indonesia akibat peristiwa tersebut, dan bagaimana langkah yang diambil Indonesia akibat dari kebijakan AS. Selanjutnya, akan menjelaskan mengenai pencabutan embargo dan kembalinya kerjasama Indonesia-AS dalam bidang pertahanan dan keamanan.

1.10.3 Bab 3

Pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan awal mula kembalinya kerjasama Indonesia-AS pasca pencabutan embargo lalu menjelaskan mengenai rasionalitas aktor Indonesia dalam menjalin kembali hubungan kerjasama dengan AS pasca embargo. Peneliti menggunakan paradigma neoliberalisme untuk menganalisis awal mula keputusan Indonesia terkait kembalinya kerjasama. Selanjutnya, pengkajian fenomena dengan menggunakan teori pilihan rasional untuk menganalisis tindakan aktor Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan melihat beberapa aspek.

1.10.4 Bab 4

Pada bab empat, peneliti akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari penelitian kualitatif eksplanatif ini. Kesimpulan ditarik berdasarkan pembahasan jawaban rumusan masalah yang telah dianalisis dengan data dan teori yang ada. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan saran untuk penelitian yang serupa.